BAB I
PENDAHULUAN

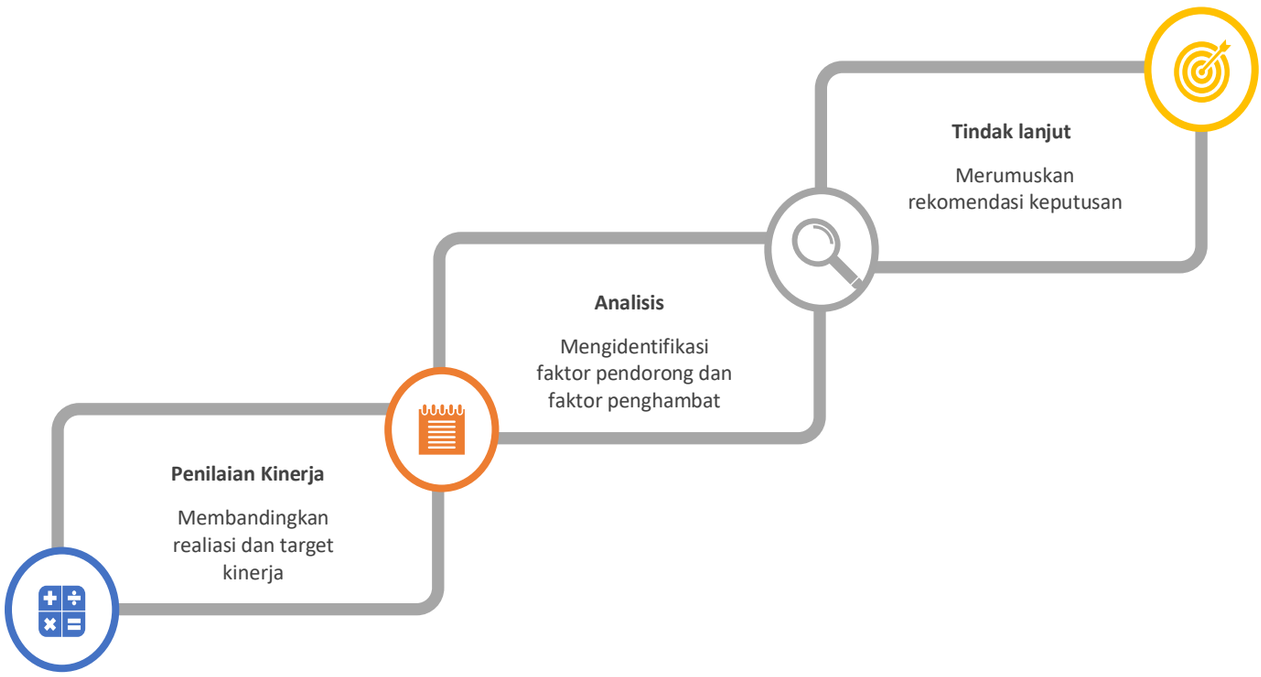
I.1. Latar Belakang

Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah merupakan suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah, serta menilai realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.

Untuk mengetahui pencapaian target kinerja pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, perlu dilakukan evaluasi Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 sampai triwulan I tanggal 14 maret 2025, melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2025 guna menjamin rencana yang telah ditetapkan dapat mencapai target kinerja tujuan dan sasaran Perangkat Daerah.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 diharapkan diperoleh data dan informasi penilaian target kinerja tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, serta Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah. Dari penilaian kinerja tersebut dapat diidentifikasi faktor pendorong dan penghambat pencapaian target kinerja, serta merumuskan tindak lanjut kebijakan yang akan diambil guna mengoptimalkan pencapaian target kinerja, dengan kerangka evaluasi sebagai berikut:

Gambar 1. Kerangka Evaluasi Renja Perangkat Daerah



Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, diolah.

Dengan demikian hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 dapat memberikan gambaran efektifitas penetapan rencana, relevansi, dampak serta keberlanjutan program pembangunan daerah terhadap permasalahan dan isu penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, serta masukan perbaikan kebijakan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah di masa yang akan datang melalui umpan balik dan *lesson-learned* peningkatan akuntabilitas kinerja.

I.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 4 Tahun 2022.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
6. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 18 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 10 Tahun 2022.

I.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dilaksanakan evaluasi Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 adalah menilai capaian target kinerja target kinerja tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, serta Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025.

Tujuan dilaksanakan evaluasi Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 adalah:

1. Mengidentifikasi faktor faktor pendorong dan penghambat pencapaian target kinerja.
2. Merumuskan tindak lanjut kebijakan yang akan diambil guna mengoptimalkan pencapaian target kinerja

I.4. Sistematika Penulisan

Evaluasi Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 disajikan dalam sistematika sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN, menguraikan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan, dan metode evaluasi Renja Perangkat Daerah.
2. BAB II CAPAIAN KINERJA RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN I TAHUN 2025 menjelaskan capaian Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah, serta capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah.
3. BAB III FAKTOR PENDORONG DAN FAKTOR PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA, menjelaskan faktor pendorong dan faktor penghambat pencapaian Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah, serta faktor pendorong dan faktor penghambat pencapaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah
4. BAB IV PENUTUP, menguraikan kesimpulan dan tindak lanjut.

I.5. Metode Evaluasi Renja Perangkat Daerah

Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 menggunakan metode evaluasi pengukuran kinerja dengan pendekatan *gap analysis*, metode ini dilakukan dengan membandingkan antara realisasi kinerja (apa yang sudah dicapai) dengan target kinerja (apa yang harus dicapai), perbandingan tersebut merupakan rasio capaian target kinerja yang dinyatakan dalam % (persentase). Dari keseluruhan capaian target kinerja dilakukan penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja dengan menggunakan kriteria sebagai berikut:

Tabel 1. Skala Nilai Peringkat Kinerja

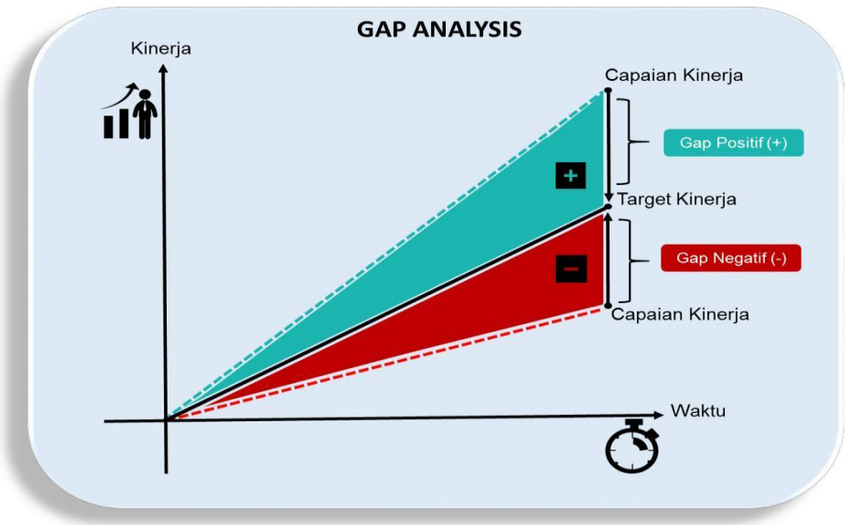
No.	Interval Nilai Capaian Kinerja	Kriteria Penilaian Capaian Kinerja
1.	≥ 91%	Sangat Tinggi
2.	76% ≤ 90%	Tinggi
3.	66% ≤ 75%	Sedang
4.	51% ≤ 65%	Rendah
5.	≤ 50%	Sangat Rendah

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

1. Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi, gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal penilaian kinerja.
2. Hasil sedang, gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.
3. Hasil rendah dan sangat rendah, gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

Pendekatan *gap analiysis* dalam evaluasi pengukuran kinerja ini membandingkan antara capaian kinerja dengan target kinerja. *Gap* dapat terjadi apabila capaian kinerja berbeda dengan target kinerja, atau hasil yang dicapai selama pelaksanaan berbeda dengan hasil yang diharapkan dalam perencanaan, sebagaimana tergambar berikut:

Gambar 2. *Gap Analysis* Antara Capaian Kinerja Dengan Target Kinerja



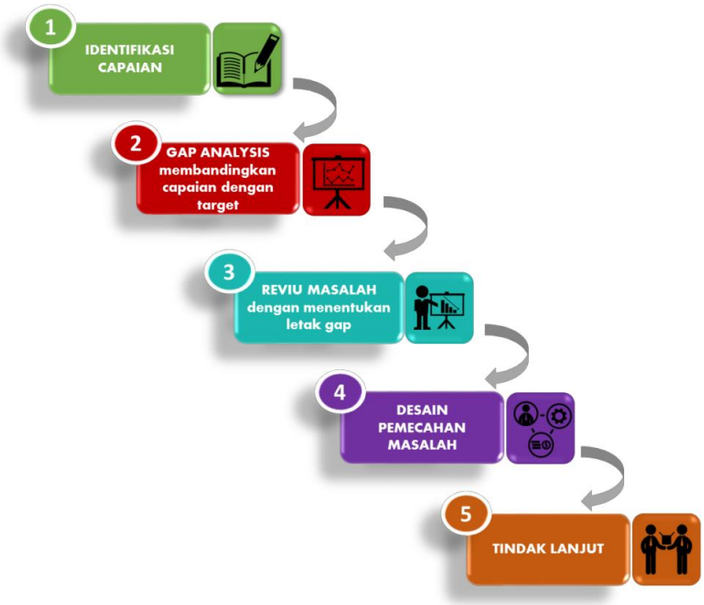
Gap antara capaian kinerja dengan target kinerja dapat bernilai positif (+) maupun negatif (-). *Gap* bernilai positif (+) jika capaian kinerja lebih besar dari target kinerja, sebaliknya *gap* akan bernilai negatif (-) jika capaian kinerja lebih kecil dari target kinerja.

Pendekatan *gap* analysis atau analisis kesenjangan bermanfaat untuk:

1. Menilai tingkat kesenjangan antara capaian kinerja dengan target yang ditetapkan.
2. Mengetahui tingkat peningkatan kinerja yang diperlukan untuk menutup kesenjangan tersebut.
3. Menjadi salah satu dasar pengambilan keputusan terkait prioritas waktu dan biaya yang dibutuhkan

Langkah-langkah yang dilakukan dalam *gap analysis*:

1. Identifikasi kondisi aktual dan capaian kinerja.
2. Melakukan analisis kesenjangan dengan membandingkan capaian kinerja dengan target kinerja.
3. Reviu permasalahan faktor pendorong dan faktor penghambat dengan menggunakan statistik deskriptif, yaitu dengan melakukan analisis permasalahan berdasarkan besar atau kecilnya *gap*.
4. Menyusun desain pemecahan masalah apabila *gap* bernilai negatif
5. Menentukan tindak lanjut yang diperlukan.



Dalam rangka memberikan informasi yang kredibel dan bermanfaat maka evaluasi Renja Perangkat Daerah harus didukung oleh data dan informasi yang akurat dan *up to date*. Mekanisme pengumpulan data menggunakan penelaahan dokumen, data survei yang dilakukan secara mandiri oleh Perangkat Daerah maupun lembaga lain yang berkompeten, seperti BPS, lembaga riset dan sebagiannya.

BAB II

CAPAIAN KINERJA RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN I TAHUN 2025

II.1. Capaian Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Capaian kinerja Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2025 disajikan sebagaimana tabel berikut:

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kinerja Tahun 2025		
				Target	Realisasi TB I	Capaian
	Meningkatnya Ketentraman dan Keteriban Umum dan Penegakan Perda		Persentase meningkatnya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Penegakan Perda	95 %	22 %	23 %
		Meningkatnya penanganan gangguan trantibum	Persentase Penanganan gangguan Trantibum yang tertangani	95 %	14 %	15 %
		Meningkatnya Penegakan Perda yang tertangani	Persentase Pelanggaran Perda yang tertangani	95 %	8 %	8 %

Analisis capaian kinerja Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2025 Capaian indikator kinerja Triwulan I sampai dengan tanggal 15 maret Tahun 2025 merupakan hasil dari pelaksanaan program/kegiatan bulan Januari sampai dengan 15 Maret 2025. Capaian kinerja yang diukur pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk dijelaskan sebagai berikut :

1. Sasaran strategis meningkatnya penanganan gangguan trantibum dengan indikator kinerja Prosentase Penanganan gangguan Trantibum yang tertangani dengan formulasi penghitungan Jumlah Penanganan Gangguan Trantibum yang tertangani : Jumlah gangguan Trantibum X 100 % menggambarkan seberapa besar Penanganan Gangguan Trantibum Tahun 2025 yang ditangani. Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, gangguan Trantibum yang dapat ditangani sebanyak 14 % dari target 95 % per tahun yang ditentukan pada restra Perangkat Daerah sehingga capaian kinerja pada sasaran I di Tribulan satu 15 %.
2. Sasaran meningkatnya Penegakan Perda yang tertangani dengan indikator kinerja prosentase Pelanggaran Perda yang Tertangani dengan formulasi penghitungan Jumlah Penanganan Perda yang tertangani : Jumlah seluruh Pelanggaran Perda X 100 % dengan target 95 % per tahun yang ditentukan pada renstra Perangkat Daerah terealisasi 8 % pada TB I, sehingga capaian kinerja pada Sasaran 2 di Tribulan satu 8 %.

II.2. Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah

No.	Program	Indikator	Kinerja Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	**NILAI SAKIP SATPOL PP**	**2.234**	**191**	**9%**
	Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu**	**380 Dokumen**	**70 Dokumen**	**18 %**

	Penyusunan Dukumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 dokumen	6 Dokumen	55 %
	Koordinasi dan Penyusunan Dukumen RKA SKPD	Jumlah Dukumen RKASKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA SKPD	6 dokumen	2	33%
	Koordinasi dan Penyusunan Dukumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capain Kinerja dan iktisar realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	2 dokumen	2	100%
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 dokumen	2	100%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Penatausahaan yang disusun secara tepat waktu**	**72 dokumen**	**45 dok**	**63%**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	52 orang	45orang	87%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2Dokumen	0 Dok	0%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/tribulan/semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulana/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	0	0 %

	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Darrah		**-**	**-**	**Recofusing**
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	Recofusing
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia**	**162**	**11**	**7%**
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	4 Paket	0 Paket	0%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	3 Paket	2 Paket	67 %
	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	3 Paket	1 Paket	33 %
	Penyediaan bahan bacaan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan bacaan dan Peraturan Perundang –Undangan yang disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
	Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan tamu	36Laporan	2	6 %
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	108 Laporan	5 Laporan	5 %
	Penatausahaan arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan Arsip Dinas Pada SKPD	7 Dokumen	0	0 %
	Kegiatan Pengadaan barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan**	**-**	**-**	**Recofusing**
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	**-**	**-**	Recofusing
	Pengadaan Mebel		**-**	**-**	Recofusing
	Pengadaan peralatan dan mesin lainya	Jumlah Unit Peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	**-**	**-**	Recofusing

	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dibayarkan tepat waktu**	**5 jenis**	**3 Jenis**	**60%**
	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1laporan	1laporan	100 %
	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	jumlah Lporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya Listrik yang disediakan	2laporan	2laporan	100%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	2 laporan	1	50%
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah dan Jenis barang milik daerah dalam kondisi baik**	**39 unit**	**5unit**	**13 %**
	Penyediaan jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 Unit	1 Unit	100%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	36 Unit	2 unit	6 %
	Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung/kantor yang terawat	2	2	100 %
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Persentase Kasus Gangguan Ketentraman dan Ketertiban umum yang tertangani**	**1854 dok**	**121**	**7%**
	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten	**Jumlah Kasus gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang tertangani**	**1744**	**106**	**6%**

	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	9	0	0%
	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Tersedianya Dokumen yang memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertertiban Umum	44	0	0%
	Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan dalam teknik Pencegahan Kejahatan	454	18	4%
	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Tersedianya Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	11	0	0%
	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PP fungsional dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja	3	0	0%
	Peningkatan Kapaditas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat		-	-	Recofusing
	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Jumlah laporan penindakan gangguan trantibum berdasarkan perda dan perkaa melalui penertiban dan penangganan unjuk rasa dab kerusuhan masa	-	-	Recofusing

	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini Cegah Dini Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli Pengamanan dan Pengawalan	Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini Pembinaan dan Penyuluhan Pelaksanaan Patroli Pengamanan terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengamanan dan Pengawalan	56	11	19 %
	Penindakan Gangguan Ketentraman an Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan unjuk rasa dan Kerusuhan massa yang dilakukan Penindakan	118	25	21 %
	Penyediaan Layanan alam rangka dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah layanan penyediaan layanan dampak penegakan Perda dan Perkada yang terlayani	2	0	0
	Pengadaan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum yang tersedia	1	0	0
	Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	**Jumlah Pelanggaran Perda yang tetangani**	**76**	**10**	**13 %**
	Pembinaan dan penyuluhan terhadap pelanggaran peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggaran Peratura Kepala Daerah	2	0	0

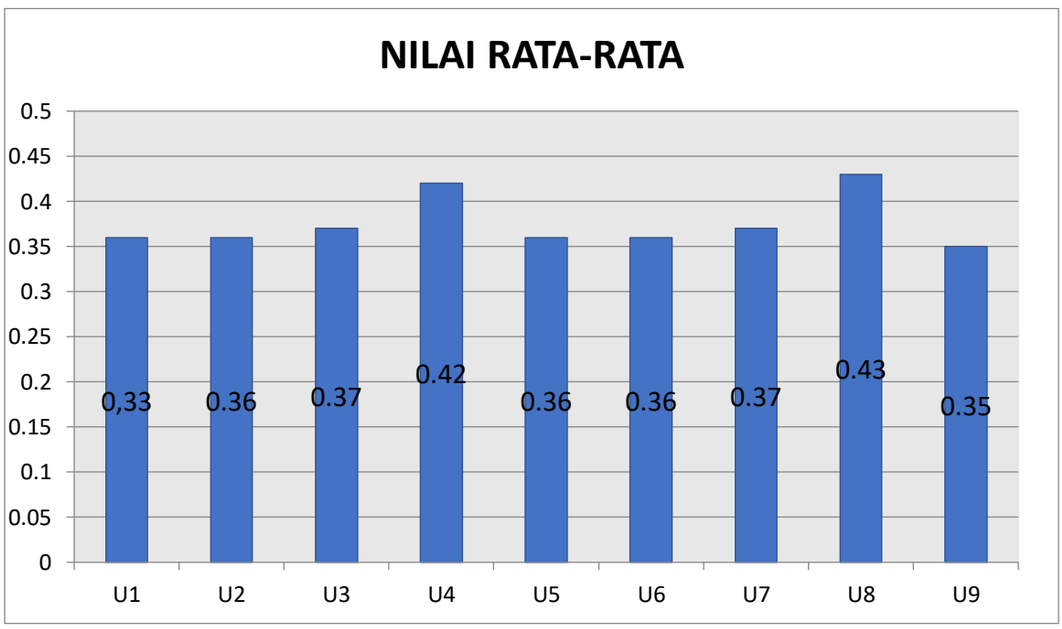
	Penyelidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	20	0	0
	Dukungan pelaksanaan sidang atas pelanggaran peraturan daerah	Jumlah Perkara yang dapat disidangkan	-	-	Recofusing
	Pemberkasan Administrasi penyidik oleh PPNS penegak Perda	Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyelidikan atas Pelanggaran Perda	-	-	Recofusing
	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada masyarakat/Kelompok masyarakat/Pelaku Usaha	5	0	0
	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/walikota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan	25	1	0,01 %
	Pengawasan kepatuhan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/walikota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang dilakukan terhadap Kepatuhan Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	46	9	19 %
	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	**Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)**	**-**	**-**	**recofusing**
	Pembentukan secretariat PPNS	Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS	**-**	**-**	recofusing
	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	-	-	recofusing

	Pembentukan PPNS penegak perda	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah	-	-	recofusing
	Dukungan Operasional sekretariat PPNS	Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS	-	-	recofusing
	Pengembangan Kapasitas dan karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapitas Pejabat PPNS Penegak Perda	-	-	recofusing

Dalam Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan Indek Kinerja Hasil Survey Kepuasan Masyarakat, yang ditargetkan pada tahun 2025 sebesar 100 % dengan kategari sangat baik pada Tribulan I telah terealisasi 84,46 % dengan katogori baik dan dari 38 responden maka diperoleh prosentase capaian sebesar 84,46 %

No	Indikator Kinerja	Twiwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
1.	Hasil survey KEPUASAN masyarakat (SKM)	84,46			

Capaian Indek Kinerja Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Tribulan I



Ketengan :

U1 : Persyaratan

U2 : Sistem, Mekanisme, Prosedur

U3 : Waktu Penyelesaian

U4 : Biaya/Tarif

U5 : Produk Spesifikasi Jenis Layanan

U6 : Kompetensi Pelaksana

U7 : Prilaku Pelaksana

U8 : Sarana dan Prasarana

U9 : Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan

Dari ke 9 Unsur IKM diatas, posisi kinerja pelayanan terendah ada pada U3 dan U9 (Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan) Dari analis tersebut maka diperlukan rencana tindak lanjut dalam perbaikan unsur pelayanan dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk antara lain :

1. Meningkatkan Komunikasi dengan masyarakat pengguna layanan dan mengoptimalkan Koordinasi dengan perangkat daerah terkait dengan penanganan pengaduan yang terjadi di masyarakat
2. Mempermudah persyaratan yang diberikan pada pengguna layanan dan memaksimalkan penggunaan Website dan Sosmed
3. Memudahkan system, mekanisme dan prosedur dalam laporan pengaduan dan penanganan pengaduan
4. Meningkatkan mutu pelayanan pada masyarakat pengguna layanan.

Pencapaian Program tersebut didukung oleh kegiatan antara lain:
Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sebanyak 16 dokumen antara lain:

1. Dokumen LKjIP tahun 2024
2. Dokumen LPPD
3. Dokemen LKPJ
4. Dokumen Renja 2026
5. Dokumen Perubahan Renja 2025
6. Dokumen Laporan Pengendalian dan Evaluasi TB I
7. Dokumen Laporan Pengendalian dan Evaluasi TB II
8. Dokumen Laporan Pengendalian dan Evaluasi TB III
9. Dokumen Laporan Pengendalian dan Evaluasi TB IV
10. Dukumen SPM
11. Dokumen SAKIP
12. Dokumen PUG
13. Renstra 2025-2030
14. Dokumen Laporan Keuangan
15. Dokumen Laporan Tribulan
16. Dokumen Evaluasi Internal

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah , dengan keluaran Jumlah Dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah yang disusun yaitu sebanyak 30 , Dokumen administrasi Gaji dan Tunjangan ASN Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk.

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan keluaran, Jumlah Penyediaan komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor, Penyediaan barang Bahan Logistik Kantor, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan , Penyediaan Bahan Bacaan Perundang undangan, Fasilitasi Kunjungan Tamu,

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD serta Penatausahaan Arsip Dinamis SKPD

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan keluaran Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan keluaran Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia sebanyak 3 jenis antara lain Jasa Surat Menyurat, Jasa Komunikasi, Sumber daya Air, Listrik dan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

Kegiatan Pemeliharaan barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan dengan Keluaran Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Jabatan serta Penyediaan Jasa Pemeliharaan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.

Dalam Pelaksanaan Tugas yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja untuk mendukung 2 Sasaran yang ingin dicapai didudukung oleh
Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan Outcome Persentase Kasus Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang tertangani dengan beberapa Sub Kegiatan yang dilaksanakan Pada TB I tahun 2025 adalah :
Kegiatan A : Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam satu (1) Daerah Kabupaten /Kota
Sub Kegiatan :

1. Koordinasi penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan Koordinasi Trantibum Kabupaten/Kota yang ada Di wilayah Provinsi Jawa Timur serta Satpol PP Provinsi untuk meningkatkan Penyelenggaran Trantibum di Daerah, Kegiatan ini di anggarkan Rp. 10.525.000 dan teralisasi Rp. 0 atau sekitar 0 %
2. Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka Peningkatan SDM Linmas di Tingkat Kecamatan peserta dari masing masing Desa di seluruh kecamatan .Dianggarkan sebesar Rp. 132.188.750 dan teralisasi Rp. 0 atau sekitar 0 %.
3. Kerjasama Antar Lembaga dan kemitraan dalam teknik Pencegahan dan Penanganan gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka kemitraan dengan Dinas Samping Polres, Kodim , Kejaksaan, CPM untuk menjaga Penanganan Gangguan Trantibum. Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 2.341.054.700 dan teralisasi Rp. 48.597.670,- atau sekitar 3 %.
4. Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Kententraman Masyarakat kegiatan ini dilaksanakan untuk melaksanakan Kegiatan Lembur Pembuatan SOP Trantibum dan Penegakan Perda. Kegiatan ini dianggarakan sebesar RP. 7.000.000,- dan terealisasi Rp. 0 atau sekitar 0 %

5. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PP Fungsional dan uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan SDM Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka Penjenjangan Karier. Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 34,990.000,- dan terealisasi 0 atau 0 %
6. Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP melalui Uji Kompetensi untuk usulan Perpindahan jabatan ke jabatan Fungsional Pol PP , Promosi dan kenaikan Jenjang Jabatan. Kegiatan ini dilaksanakan untuk mendukung Karier bagi fungsional Satpol PP yang sudah memenuhi persyaratan untuk pengalihan jabatan Fungsional yang lebih tinggi. Kegiatan ini di anggarkan sebesar Rp. 15.280.000,- dan terealisasi 0 atau sekitar 0 %
7. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat Kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan SDM Satuan Perlindungan Masyarakat dalam rangka membantu ketentraman dan ketertiban Umum yang ada di masyarakat , serta penanggulangan bencana. Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 185.126.850,- dan terealisasi sebesar Rp. 0 atau 0 %
8. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Satpol PP dan Satlinmas Kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan Kapasitas SDM Satpol PP dan Satlinmas dalam rangka Pengamanan Ketentraman dan Ketertiban Umum. Kegiatan ini di anggarkan sebesar 140.000.000 dan terealisasi sebesar 0 atau 0 %.
9. Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui deteksi dini cegah dini, Pembinaan, Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli dan Pengamanan kegiatan ini dilaksanakan untuk antisipasi Ketentraman dan Ketertiban umum dengan kegiatan Patroli Wilayah di daerah rawan gangguan trantibum yang ada dikabupaten Nganjuk, serta Pengamanan dan Pengawalan Bupati dan Pejabat Negara lainnya serta pengamanan asset Daerah, dan Pembayaran Gaji Tenaga Kontrak. Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 740.170.800,- terealisasi sebesar Rp 91.448.460,- atau sekitar 12 %
10. Penindakan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban Unjuk rasa dan kerusuhan massa. Kegiatan ini dilaksanakan untuk Penertiban dan Pelanggaran Perda yang ada di masyarakat sesuai dengan SOP dan tugas Pokok fungsi Satpol PP, serta kegiatan unjuk rasa dan kerusuhan massa yang berpotensi menggangu Ketentraman dan Ketertiban Umum . Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 150.000.000,- teralisasi sebesar Rp. 9.659.600,- atau sekitar 6 %.

11. Penyediaan Layanan dalam rangka dampak Penegakan Perda

    Kegiatan ini dilaksanakan untuk Pemberian bantuan kepada warga yang terdampak akibat dari Penegakan Hukum, Radius 50 m dari tempat kejadian Penegakan Perda. Di di anggarkan sebesar Rp. 5.000.000,- dan teralisasi Rp. 0 atau 0 %

12. Pengadaan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum Kegiatan ini dilaksanakan untuk memenuhi sarana dan prasarana trantibum dimana Satuan Polisi Poamong Praja sebagai garda terdepan Penegakan Perda masih banyak sapras yang belum sesuai dengan amanat Permendagri No 121 Tahun 2018 tentang STANDAR TEKNIS MUTU PELAYANAN DASAR SUB URUSAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM . Dianggarkan sebesar Rp. 119.829.000 dan teralisasi Rp.0 atau 0 %.

Kegiatan B : Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota

Sub Kegiatan :

1. Pembinaan dan Penyuluhan terhadap pelanggaran Peraturan Derah dan Peraturan Kepala Daerah kegiatan ini dilaksanakan untuk memberikan Pembinaan serta Penyuluhan kepada masyarakat pelanggar perda, pada waktu pelaksanaan operasi Pelanggaran Perda berlangsung. Kegiatan ini di anggarkan sebesar Rp. 9.400.000,- dan terealisasi Rp. 0 atau 0 %.
2. Penyelidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah kegiatan ini dilaksanakan untuk pemberkasan pelanggaran Perda , Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 20.000.000,- dan terealisasi 0 atau 0 %..
3. Dukungan pelaksanaan sidang atas pelangaran Peraturan Daerah kegiatan ini dilaksanakan untuk pemberkasan penyidikan kepada masyarakat pelanggar Perda yang akan diberikan saksi. Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 14.599.700,- dan terealisasi 0 atau 0 %
4. Pemberkasan administrasi penyidik pegawai oleh PPNS Penegak Perda kegiatan ini di laksanakan untuk untuk melakukan lembur dalam rangka pemberkasan kepada warga masyarakat pelanggar Perda. Dianggarkan sebesar Rp. Rp. 3.126.150 dan terealisasi 0 atau 0 %.
5. Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota Kegiatan ini dilaksanakan untuk memberikan wawasan dan pemahaman kepada warga masyarakat ketentuan perundang-undangan baik tentang Ketertiban, Kebersihan, Keindahan (K3) . Kegiatan ini di anggarkan sebesar Rp. 50.000.000,- dan terealisasi 0 atau 0 %
6. Penanganan Atas Pelanggaran Kepatuhan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota

   Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka Penangan Pelanggaran Peraturan Daerah yang dilakukan oleh Pelanggar Perda. Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 20.000.000,- terealisasi Rp. 3.600.000,- atau sekitar 18 %.

7. Pengawasan atas kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

   Kegiatan ini dilaksanakan untuk memberiakan Pengawasan Kepada masyarakat Pelanggar Perda atau Badan Usaha, sehingga tidak lagi muncul kegiatan yang sama dengan pelaku yang sama. Dianggarkan sebesar Rp. 50.132.400,- dan teralisasi sebesar Rp. 9.375.000,- atau sekitar 19 %

Kegiatan C : Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Sub Kegiatan :

1. Pembentukan secretariat PPNS kegiatan ini dilaksanakan untuk mendukung Pelaksanaan kegiatan Pelanggaran Perda yang dilakukan oleh masyarakat. Dianggarkan sebesar Rp. 25.000.000- dan terealisasi 0 atau 0 %.
2. Kerjasama antar lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah

   Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka kemitraan dengan Dinas luar PPNS Penegak Perda. Dianggarkan sebesar Rp. 25.000.000,- dan teralisasi sebesar Rp. 0 atau sekitar 0 %.
3. Pembentukan PPNS Penegak Perda kegiatan ini dilaksanakan untuk bimbingan Teknis PPNS Penegak Perda . Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 70.640.000,- dan terealisasi 0 atau 0 %.
4. Dukungan Operasional secretariat PPNS kegiatan ini dilaksanakan untuk memberikan dukungan Operasional PPNS . Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 44.000.000 dan teralisasi 0 atau 0 %
5. Pengembangan kapasitas dan karier PPNS kegiatan ini dilaksanakan untuk mengembangkan kapasitas PPNS. Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 29.999.900 dan terealisasi sebesar Rp. 0 atau 0 %

BAB III

FAKTOR PENDORONG DAN FAKTOR PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA

III.1. Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Pencapaian Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah

Analisis Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Pencapaian Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah disajikan dalam tabel berikut:

No.	Tujuan/Sasaran	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
	Tujuan : Meningkatnya Ketentraman dan Keteriban Umum dan Penegakan Perda Sasaran : Meningkatnya penanganan gangguan Trantibum dan Meningkatnya Penegakan Perda yang tertangani	1. Tersedianya Dukungan Anggaran dari APBD 2. Adanya Regulasi daerah yang sesuai dengan situasi dan kondisi daerah terkait dengan tugas pokok dan fungsi 3. Peningkatan Kapasitas dan Jumlah anggota Satpol PP 4. Tersedianya Sarana dan Prasarana yang memadai	1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kepatuhan Peraturan Daerah dan penciptaan Ketentraman dan Ketertiban 2. Belum adanya regulasi yang kuat sesuai dengan situasi dan kondisi daerah terkait dengan tugas pokok dan fungsi

III.2 **Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat Pencapaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah**

Analisis Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Pencapaian Tujuan Program Kegiatan dan Sub Kegiatan disajikan dalam table berikut :

No.	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	Dukungan Anggran dari APBD	
1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**	Dukungan Anggran dari APBD	

1.05.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Dukungan Anggran dari APBD	
1.05.01.2.01	**Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah**	Dukungan Anggran dari APBD	
1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dukumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dukungan Anggaran dari APBD	Sistem SIPD yang terlalu sering mengalami down grade
1.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dukumen RKA SKPD	Dukungan Anggaran dari APBD	Hanya dapat mengakses SIPD pada malam hari s/d dini hari
1.05.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dukumen Perubahan RKA SKPD	Dukungan Anggaran dari APBD	Sering mengalami perubahan Versi sehingga perlu penyesuaian kembali terhadap Aplikasi yang telah diperbaharui atau diganti
1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capain Kinerja dan iktisar realisasi Kinerja SKPD	Dukungan Anggaran dari APBD	Sistem Pada DUBB yang belum Optimal sehingga data yang sudah dimasukan tidak tersimpan
1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dukungan Anggaran dari APBD	Sistem Pada DUBB yang belum Optimal sehingga data yang sudah dimasukan tidak tersimpan
1.05.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Dukungan Anggaran dari APBD	

1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dukungan Anggaran dari APBD	Sistem Aplikasi SIPD yang lemot,akses bisa sering pada malam hari
1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dukungan Anggaran dari APBD	SIPD sering mentenen
1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/tribulan/semesteran SKPD	Dukungan Anggaran dari APBD	SIPD sering mentenen
1.05.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Dukungan Anggaran dari APBD	
1.05.01.2.05.002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Dukungan Anggaran dari APBD	Kesulitan mencari Penyedia yang barangnya ber TKDN
1.05.01.2.06	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Dukungan Anggaran dari APBD	
1.05.01.2.06.0001	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya anggaran dari APBD	Proses pengadaan barang sesuai di E-katolog
1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya anggaran dari APBD	Terjadi eroor pada Sistem E-katolog
1.05.01.2.06.0005	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Tersedianya anggaran dari APBD	Penyediaan barang disesuaikan E-katalog
1.05.01.2.06.0006	Penyediaan bahan bacaan Perundang-undangan	Tersedianya anggaran dari APBD	Banyaknya beredar media yang muncul saat ini pada Metsos
1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi kunjungan tamu	Tersedianya anggaran dari APBD	Jumlah dan waktu kehadiran tamu yang tidak dapat direncanakan

1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Tersedianya anggaran dari APBD	Pelaksanaan kegiatan yang tidak mudah untuk direncanakan
1.05.01.2.06.0010	Penatausahaan arsip Dinamis pada SKPD	Tersedianya anggaran dari APBD	- Terbatasnya lokasi penyimpanan arsip - Belum adanya petugas kearsipan
1.05.01.2.07	**Kegiatan Pengadaan barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Tersedianya anggaran dari APBD	
1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya anggaran dari APBD	Kesulitan mencari Penyedia yang barangnya ber TKDN
1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Tersedianya anggaran dari APBD	
1.05.01.2.07.0006	Pengadaan peralatan dan mesin lainya	Tersedianya anggaran dari APBD	Proses pengadaan yang harus disesuaikan dengan E-katalog
1.05.01.2.08	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		
1.05.01.2.08.0001	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya Aplikasi Srikandi	Sering Terjadi eroor pada Sistem Srikandi
1.05.01.2.08.0002	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Tersedianya Anggaran dari APBD	Sering nya WAFI lemot sehingga menganggu kinerja
1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya anggaran dari APBD	Penyediaan jasa yang disesuaikan dengan peraturan yang berlaku

1.05.01.2.09	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		
1.05.01.2.09.0001	Penyediaan jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya anggaran dari APBD	Penyediaan barang/jasa sesuai dengan E-katalog
1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya anggaran dari APBD	Penyediaan barang/jasa sesuai dengan E-katalog
1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Tersedianya anggaran dari APBD	Penyediaan barang/jasa sesuai dengan E-katalog
1.05.02	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Dukungan Anggaran dari APBD	
1.05.02.2.01	**Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten**	Dukungan Anggaran dari APBD	
1.05.02.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Dukungan Anggaran dari APBD	NIHIL / Tidak ada Faktor Penghambat
1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Peningkatan Pengetahuan bagi Anggota Linmas	Belum semua Anggota Linmas dapat tersasar kegiatan tsb dikarenakan terbatasnya Anggaran

1.05.02.2.01.0006	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kegiatan Penanganan gangguan Trantibum dapat dilaksanakan dengan maksimal dengan dukungan dari dinas samping	Kerjasama yang dilaksanakan selama ini hanya terkait dengan gangguan trantibum belum pada kerjasama terkait dengan Penanganan Pelanggaran Perda
1.05.02.2.01.0008	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Untuk Kelancaran Pelaksanaan TUPOKSI	Penyusunan SOP belum maksimal karena SDM
1.05.02.2.01.0010	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PP fungsional dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional	Peningkatan SDM	Kurang minat anggota
1.05.02.2.01.0012	Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP melalui Uji Kompetensi untuk usulan perindahan jabatan ke jabatan Fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan	Peningkatan SDM	Nihil
1.05.02.2.01.0013	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat	Dukungan Anggaran APBD	Dukungan Anggaran yang minim
1.05.02.2.01.0014	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Satpol PP dan Satlinmas	Dukungan Anggaran APBD	Dukungan Anggaran yang minim
1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan Pelaksanaan Patroli , Pengamanan dan Pengawalan	Dukungan Anggaran APBD	Kurangnya SMD sehingga Kegiatan Patroli Wilayah tidak dilaksanakan sesuai dengan SOP

1.05.02.2.01.0016	Penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penangan unjuk rasa dan kerusuhan massa	Dukungan Anggaran APBD	Masih Banyaknya Masyarakat Pelanggar Perda terkait dengan Anjal gepeng,miras dan PSK
1.05.02.2.01.0017	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Tersedianya Anggaran pada APBD	Belum semua masyarakat paham terkait Dampak Penegakan Perda
1.05.02.2.01.0018	Pengadaan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum	Tersedianya Anggaran pada APBD	
1.05.02.2.02	**Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**		
1.05.02.2.02.004	Pembinaan dan Penyuluhan terhadap pelanggaran peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Tersedianya Anggaran pada APBD	Banyak Pelanggar Perda yang ada di Kab. Nganjuk
1.05.02.2.02.007	Penyelidikan terhadap Pelanggaran peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Tersedianya Anggaran pada APBD	
1.05.02.2.02.008	Dukungan pelaksanaan sidang atas pelanggaran peraturan daerah	Tersedianya Anggaran pada APBD	
1.05.02.2.02.009	Pemberkasan Administrasi penyidik oleh PPNS penegak perda	Tersedianya Anggaran pada APBD	
1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah Peraturan Bupati/Walikota	Tersedianya Anggaran pada APBD	Belum semua masyarakat dan pelaku usaha tersasar kegiatan tsb
1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Tersedianya Anggaran APBD	Kurangnya PPNS Penegak Perda
1.05.02.2.02.0012	Pengawasan kepatuhan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/walikota	Tersedianya Anggaran APBD	Masih banyaknya Pelanggar Perda dari Pelaku Usaha

1.05.02.2.03	**Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota**		
1.05.02.2.03.0002	Pembentukan secretariat PPNS	Dukungan Anggaran APBD	SDM
1.05.02.2.03.0003	Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Dukungan Anggaran APBD	SDM
1.05.02.2.03.0004	Pembentukan PPNS Penegak Perda	Dukungan Anggaran APBD	-
1.05.02.2.03.0005	Dukungan Operasional sekretariat PPNS	Dukungan Anggaran APBD	Terbatasnya Sapras
1.05.02.2.03.0003	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Dukungan Anggaran APBD	SDM

BAB IV

PENUTUP

IV.1 Kesimpulan

Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari hasil pengukuran kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk Tribulan I Tahun 2025 antara lain:

1. Sebanyak 2 (dua) Indikator Kinerja yang telah dilakukan pengukuran pada Tribulan I untuk capain kinerja pada indicator Persentase Penanganan gangguan Trantibum yang tertangani Target tahunan yang ditentukan 95 %, dan sampai dengan TW I teralisasi 14 %. Capain 15 %

2. Untuk Indikator Persentase Pelanggaran Perda yang tertangani dengan target yang Tahunan 95 % sampai dengan TB I terealisasi 8 % capaian 8%

3. Untuk Penyerapan Anggaran yang sangat rendah pada TB I dikarenakan ada Penyesuaian Anggaran Recufusing 2025, sehingga hanya kegiatan Gaji dan Rutin yang tidak bisa ditunda Pelaksanaanya. Baru pada bulan maret setelah anggaran rekofusing disetujui bisa dilaksanakan.

Capaian realisasi anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk s.d. 14 Maret 2025 sebesar Rp 912.131.861,- atau 6 % dari pagu anggaran, Rp. 14.341.843.223,- sehingga sisa Rp 13.429.711.362 atau 94 % anggaran tersisa.

IV.2 **Tindak Lanjut**

Anggaran menyesuaikan dengan Anggaran Perubahan Recufusing

IV.3 Rekomendasi

Untuk para PPTK segera menyesuaikan Anggaran Rekufusing sesuai dengan Aliran Kas.

Nganjuk, 14 Maret 2025
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN NGANJUK

SUHARONO, S.Sos, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19690905 199003 1 005

LAPORAN EVALUASI TRIBULAN TAHUN 2025

NO	Sasaran	Kode	rusan/Bidang Urusa Pemerintahan Daera dan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	dikator Kinerj Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	rget RPD pada Tahun 2024 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja RPD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun lalu (2024)			arget Kinerja dan Anggara RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (2025)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahu 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaa RKPD Tahun 2026)			gkat Capaia Kinerja Dan Realisa Anggaran RPJMD s/d Tahun 202		it Perangkat Daerah Penanggun jawab
													I		II		III		IV										
1	2	3	4	5	6			7			8			9			10			11			12			13			14=7+13			15=14/6		16
					K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		p	K		Rp	K		p	K		Rp	K		Rp		Rp	
1	ningkatnya ketentraman dan ketertiban umum dan Penegakan Perda		USAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT		193		42.181.172.193	10.901		12.781.716.275	2.234		14.341.843.223	40		912.131.861										140		912.131.861	11.041		13.693.848.136	*16,28*	*32,46*	tuan Polisi Pamong Praja
		05.01	***OGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TA***	*ai Sakip*	*15*	*ai*	*32.376.157.773*	*59*	*ai*	*7.066.311.191*	*80*	*ai*	*10.098.779.973*	*8*	*lai*	*749.451.131*	*0*	*ai*	*0*	*0*	*ai*	*0*	*0*	*ai*	*0*	*58*	*ai*	*749451131*	*17*	*ai*	*7.815.762.322*	*0,31*	*24,14*	***tuan Polisi Pamong Praja***
		.05.01.2 .02	**ministrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**mlah Dokumen Penatausahaan Sub Kegiatan yang disusun secara tepat waktu**	**73**	**kumen**	**26.348.317.500**	**73**	**kumen**	**5.819.238.843**	**72**	**kumen**	**7.236.230.413**	**45**	**kumen**	**679.126.672**	**0**	**kumen**	**0**	**0**	**kumen**	**0**	**0**	**kumen**	**0**	**45**	**kumen**	679.126.672	118	**kumen**	**6.498.365.515**	**1,64**	**24,66**	**tuan Polisi Pamong Praja**

		5.01.2.02 .0001	nyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	nlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	53	ng/bulan	26.320.650.000	53	ng/bulan	5.809.050.843	52	ng/bulan	7.226.302.413	45	ng/bulan	679.126.672	0	ng/bulan	0		ng/bulan	0	0	ng/bulan	0	45	ng/bulan	679.126.672	98	ng/bulan	6.488.177.515	4,91	24,65	tuan Polisi Pamong Praja
		5.01.2.02 .0005	ordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	nlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2	oran	13.020.000	2	oran	4.961.000	2	oran	5.088.000	0	oran	-	0	oran	0	0	oran	0	0	oran	0	0	oran	-	2	oran	4.961.000	0,00	38,10	tuan Polisi Pamong Praja
		5.01.2.02 .0007	ordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	nlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18	oran	14.647.500	18	oran	5.227.000	18	oran	4.840.000	0	oran	-	0	oran	0	0	oran	0	0	oran	0	0	oran	-	18	oran	5.227.000	0,00	35,69	tuan Polisi Pamong Praja

		.05.01.2.01	**rencanaan Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**mlah dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun secara tepat waktu**	**16**	**kumen**	**120.120.000**	**13**	**kumen**	**36.848.000**	**11**	**kumen**	**32.406.000**	**0**	**kumen**	**-**		**kumen**	**0**	**0**	**kumen**	**0**	**0**	**kumen**		0	**kumen**	-	13	**kumen**	36.848.000	**25**	**30,68**	**tuan Polisi Pamong Praja**
		5.01.2.01.0001	hyusunan Dukumen Perencanaan Perangkat Daerah	mlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	kumen	29.120.000	6	kumen	5.115.000	6	kumen	14.628.000	0	kumen	-	0	kumen	0	0	kumen	0	0	kumen	0	0	kumen	-	6	kumen	5.115.000	0,00	17,57	tuan Polisi Pamong Praja
		5.01.2.01.0002	ordinasi danPenyusunan DukumenRKA SKPD	mlah DokumenPerubahan RKA-SKPDdan Laporan HasilKoordinasiPenyusunan DokumenPerubahan RKA-SKPD	1	kumen	10.920.000	1	kumen	6.599.500	1	kumen	4.968.000	0	kumen	-	0	kumen	0	0	kumen	0	0	kumen	0	0	kumen	-	1	kumen	6.599.500	0,00	60,43	tuan Polisi PamongPraja
		.05.01.2.01.0003	ordinasi danPenyusunan DukumenPerubahan RKA SKPD	mlah DokumenDPA-SKPD dan LaporanHasil KoordinasiPenyusunan DokumenDPA-SKPD	1	kumen	10.920.000	1	kumen	5.842.000	1	kumen	3.670.000	0	kumen	-	0	kumen	0	0	kumen	0	0	kumen	0	0	kumen	-	1	kumen	5.842.000	0,00	53,50	tuan Polisi PamongPraja

		5.01.2.01 .0004	ordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	nlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	kumen	12.740.000	1	kumen	2.292.000	0	kumen	0	0	kumen	-	0	kumen	0	0	kumen	0	0	kumen	0	0	kumen	-	1	kumen	2.292.000	),0 0	17,99	tuan Polisi Pamong Praja
		5.1.2.01. 0005	ordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	nlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2	kumen	12.740.000	1	kumen	2.292.000	0	kumen	0	0	kumen	-	0	kumen	0	0	kumen			kumen		0	kumen	-	1	kumen	2.292.000	00	17,99	tuan Polisi Pamong Praja
		5.01.2.01 .0007	aluasi Kinerja Perangkat Daerah	nlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	poran	14.560.000	2	poran	5.485.500	2	poran	3.300.000	0	poran	-	0	poran	0		poran			poran		0	poran	-	2	poran	5.485.500	),0 0	37,68	tuan Polisi Pamong Praja

		5.1.2.01.0006	ordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	nlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	bor an	29.120.000	1	bor an	9.222.000	1	bor an	5.840.000	0	bor an	-		bor an	0	0	bor an	0	0	bor an		0	bor an	-	1	bor an	9.222.000	0,00	31,67	tuan Polisi Pamong Praja
		.05.01.2.05	**ministrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**nlah Pegawai yang difasilitasi Pakaian Dinas**	**86**	**ket**	**152.323.200**	**0**	**ket**	**0**	**86**	**ket**	**259.487.400**	**-**	**ket**	**-**		**ket**	**0**	**0**	**ket**	**0**		**ket**	**0**	0	**ket**	-	0	**ket**	-	**00**	**0,00**	**tuan Polisi Pamong Praja**
		5.01.2.05.0002	ngadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	nlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	86	ket	152.323.200	0	ket	0	86	ket	259.487.400	0	ket	-	0	ket	0	0	ket	0	0	ket	0	0	ket	-	0	ket	-	00	0,00	tuan Polisi Pamong Praja
		5.01.2.06	**ministrasi Umum Perangkat Daerah**	**nlah Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia**	**99**	**ket**	**2.038.400.000**	**35**	**ket**	**493.222.040**	**62**	**ket**	**591.903.760**	**6**	**ket**	**9.803.250**	**0**	**ket**	**0**	**0**	**ket**	**0**	**0**	**ket**	**0**	6	**ket**	9.803.250	41	**ket**	503.025.290	**85**	**24,68**	**tuan Polisi Pamong Praja**

		5.01.2.06 .0001	nyediaan komponen intalasi listrik/penerangan bangunan kantor	nlah Paket komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	4	ket	21.840.000	4	ket	7.965.000	4	ket	7.182.660	0	ket	-	0	ket	0	0	ket	0	0	ket	0	0	ket	-	4	ket	7.965.000	),00	36,47	tuan Polisi Pamong Praja
		5.01.2.06 .0004	nyediaan Bahan Logistik Kantor	nlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3	ket	637.000.000	3	ket	97.041.540	3	ket	126.823.900	2	ket	3.607.500	0	ket	0	0	ket	0	0	ket	0	2	ket	3.607.500	5	ket	100.649.040	5,67	15,80	tuan Polisi Pamong Praja
		5.01.2.06 .0005	nyediaan barangcetak danpenggandaan	nlah Paket BarangCetakan danPenggandaan yangDisediakan	3	ket	36.400.000	3	ket	9.929.500	3	ket	6.997.200	1	ket	1.095.750	0	ket	0	0	ket	0	0	ket	0	1	ket	1.095.750	4	ket	11.025.250	3,33	30,29	tuan Polisi PamongPraja
		5.01.2.06 .0006	nyediaan bahan bacaan per undang-undangan	nlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5	kumen	36.400.000	5	kumen	2.352.000	1	kumen	2.400.000	0	kumen	-	0	kumen	0	0	kumen	0	0	kumen	0	0	kumen	-	5	kumen	2.352.000	),00	6,46	tuan Polisi Pamong Praja
		5.01.2.06 .0008	silitas Kunjungan Tamu	nlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	36	poran	87.360.000	35	poran	22.222.500	36	poran	28.800.500	2	poran	1.890.000	0	poran	0	0	poran	0	0	poran	0	2	poran	1.890.000	37	poran	24.112.500	2,78	27,60	tuan Polisi Pamong Praja
		5.01.2.06 .0009	nyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	nlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	08	poran	1.183.000.000	78	poran	344.921.000	08	poran	407.900.500	1	poran	3.210.000	0	poran	0	0	poran	0	0	poran	0	1	poran	3.210.000	79	poran	348.131.000	15	29,43	tuan Polisi Pamong Praja

		5.01.2.06.0010	natausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	mlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	7	kumen	36.400.000	7	kumen	8.790.500	7	kumen	11.799.000	0	kumen	-	0	kumen	0	0	kumen	0	0	kumen	0	0	kumen	0	0	kumen	-	7	kumen	8.790.500	,00	24,15	tuan Polisi Pamong Praja
		5.01.2.07	**ngadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**mlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan**	**4**	**his**	**4.113.200.000**	**2**	**his**	**91.150.000**	**5**	**his**	**1.120.867.500**	**0**	**his**	**-**	**0**	**his**	**0**	**0**	**his**	**0**	**0**	**his**	**0**	**0**	**his**	**0**	**0**	**his**	**0**	2	**his**	91.150.000	**00**	**2,22**	**tuan Polisi Pamong Praja**
		5.01.2.07.0001	ngadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	mlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1	t	1.019.200.000	2	t	91.150.000	2	t	38.500.000	0	t	-	0	t	0	0	t	0	0	t	0	0	t	0	0	t	-	2	t	91.150.000	,00	8,94	tuan Polisi Pamong Praja
		5.01.2.07.0002	ngadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	mlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	t	2.912.000.000	0	t	0	1	t	1.000.000.000	0	t	-	0	t	0	0	t	0	0	t	0	0	t	0	0	t	-	0	t	-	00	0,00	tuan Polisi Pamong Praja
		5.01.2.07.0005	ngadaan Mebel	mlah Paket Mebel yang Disediakan	2	ket	182.000.000	0	ket	0	2	ket	82.367.500	0	ket	-	0	ket	0	0	ket	0	0	ket	0	0	ket	0	0	ket	-	0	ket	-	00	0,00	tuan Polisi Pamong Praja
		5.01.2.08	**nyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**mlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dibayarakan tepat waktu**	**7**	**bo ran**	**629.720.000**	**5**	**bo ran**	**159.363.637**	**5**	**bo ran**	**249.260.000**	**2**	**bo ran**	**10.954.799**		**bo ran**	**0**	**0**	**bo ran**	**0**	**0**	**bo ran**	**0**	2	**bo ran**	10.954.799	7	**bo ran**	170.318.436	**,00**	**27,05**	**tuan Polisi Pamong Praja**

		5.01.2.08.0001	hyediaan Jasa Surat Menyurat	mlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	bor an	10.920.000	1	bor an	2.993.500	1	bor an	3.000.000	0	bor an	-	0	bor an	0	0	bor an	0	0	bor an	0	0	bor an	-	1	bor an	2.993.500	),00	27,41	tuan Polisi Pamong Praja
		5.01.2.08.0002	hyediaan jasakomunikasi sumberdaya air dan listrik	mlah LaporanPenyediaan JasaKomunikasi SumberDaya Air dan Listrikyang Disediakan	3	bor an	400.400.000	2	bor an	47.772.309	2	bor an	94.000.000	2	bor an	10.954.799	0	bor an	0	0	bor an	0	0	bor an	0	2	bor an	10.954.799	4	bor an	58.727.108	3,33	14,67	tuan Polisi PamongPraja
		5.01.2.08.0004	hyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	mlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	bor an	218.400.000	2	bor an	108.597.828	2	bor an	152.260.000	0	bor an	-	0	bor an	0	0	bor an	0	0	bor an	0	0	bor an	-	2	bor an	108.597.828	67	49,72	tuan Polisi Pamong Praja
		5.01.2.09	**meliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**mlah dan jenis barang milik daerah dalam kondisi baik**	**45**	**it**	**2.402.400.000**	**31**	**it**	**466.488.671**	**39**	**it**	**608.624.900**	**5**	**it**	**49.566.410**	**0**	**it**	**0**	**0**	**it**	**0**	**0**	**it**	**0**	**5**	**it**	**49.566.410**	36	**it**	516.055.081	**00**	**21,48**	**tuan Polisi Pamong Praja**
		5.01.2.09.0001	hyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	mlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	t	473.200.000	1	t	60.807.683	1	t	86.586.800	1	t	11.224.282		t			t			t	0	1	t	11.224.282	2	t	72.031.965	),00	15,22	tuan Polisi Pamong Praja

		5.01.2.09 .0002	nyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	mlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinan nya	36	t	1.456.000.000	28	t	341.887.188	36	t	443.038.100	2	t	33.247.128	0	t	0	0	t	0		t	0	2	t	33.247.128	30	t	375.134.316	33	25,76	tuan Polisi Pamong Praja
		5.01.2.09 .0006	meliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	mlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2	t	291.200.000	2	t	63.793.800	2	t	79.000.000	2	t	5.095.000	0	t	0	0	t	0	0	t	0	2	t	5.095.000	4	t	68.888.800	0,00	23,66	tuan Polisi Pamong Praja
		.01.2.09. 0007	meliharaan Aset Tetap lainnya	mlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	5	t	182.000.000	0	t	0	0	t	0	0	t	-	0	t	0	0	t	0	0	t	0	0	t	-	0	t	-	00	0,00	tuan Polisi Pamong Praja
		05.02	***OGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM***	***rsentase kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang tertangan***	***00***	***sen***	***9.805.014.420***	***10.642***	***sen***	***5.715.405.084***	***54***	***sen***	***4.243.063.250***	***82***	***sen***	***162.680.730***		***sen***	***-***	***-***	***sen***	***-***		***sen***	***-***	***82***	***sen***	***162.680.730***	***724***	***sen***	***5.878.085.814***	***724,00***	***59,95***	***tuan Polisi Pamong Praja***
2	ningkatnya Penanganan Gangguan Trantibum	**5.02.2.01**	**nanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten**	**mlah Kasus Gangguan Ketentraman dan Ketertiban umum yang tangani**	**847**	**sus**	**9.196.414.374**	**10.577**	**sus**	**4.165.025.127**	**44**	**sus**	**3.881.165.100**	**70**	**sus**	**149.705.730**		**sus**			**sus**			**sus**		70	**sus**	149.705.730	647	**sus**	4.314.730.857	**16**	**46,92**	**tuan Polisi Pamong Praja**

		5.02.2.01 .0003	ordinasiPenyelenggaraanKetentramandanKetertiban UmumSerta PerlindunganMasyarakat TingkatKabupaten/Kota	nlah Dokumen HasilPelaksanaanKoordinasiPenyelenggaraanKetenteramanKetertiban Umum danPerlindunganMasyarakat TingkatKabupaten/ Kota	3	ku me n	100.743.860	3	ku me n	9.682.500	9	ku me n	10.525.000		ku me n			ku me n			ku me n			ku me n			0	ku me n	-	3	ku me n	9.682.500	0,00	9,61	tuan Polisi PamongPraja
		5.02.2.01 .0015	ncegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melaui deteksi dini dan cegah dini Pembinaan Penyuluha Pelaksanaan Patroli Pengamanan dan Pengawalan	nlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini Pembinaan dan Penyuluhan Pelaksanaan Patroli Pengamanan dan Pengawalan	56	bor an	2.271.293.800	56	bor an	849.777.952	00	bor an	740.170.800	62	bor an	91.448.460		bor an			bor an			bor an			62	bor an	91.448.460	18	bor an	941.226.412	0,71	41,44	tuan Polisi Pamong Praja

		5.02.2.01 .0016	hindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	mlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan perda dan perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	18	bor an	400.000.000	18	bor an	39.687.000	90	bor an	150.000.000	6	bor an	9.659.600		bor an			bor an			bor an			6	bor an	9.659.600	24	bor an	49.346.600	6,0 8	12,34	tuan Polisi Pamong Praja
		5.02.2.01 .0004	mberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	mlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	20	ku me n	1.267.500.000	19	ku me n	1.964.910.000	44	ku me n	132.188.750		ku me n			ku me n			ku me n			ku me n			0	ku me n	-	19	ku me n	1.964.910.000	00	155,02	tuan Polisi Pamong Praja

		5.02.2.01 .0005	ningkatan Kapasitas SDM Satpol PP dan Satlinmas termasuk dalam pelaksanaan tugas Hak Asasi Manusia	nlah SDM Satuan Polisi Pamong praja dan Satuan Perlin dungan Masyarakat yang Ditingkat kan Kapasitas nya	90	ng	1.139.738.600	0	ng	0	0	ng	0		ng			ng			ng			ng		0	ng	-	0	ng	-	00	0,00	tuan Polisi Pamong Praja
		5.02.2.01 .0010	ningkatankapasitas SDM satuanpolisi pamong prajamelalui penddidikandan pelatihan dasarpol pp fungsionalpol pp dan ujikopetensi penjabatfungsiona l	nlah aparatursat pol pp yangmengik uti pendidikand an pelatihan dasarpolisi pamong praja	10	ng	105.000.000	0	ng	0	3	ng	34.990.000		ng			ng			ng			ng		0	ng	-	0	ng	-	00	0,00	tuan Polisi PamongP raja
		5.02.2.01 .0012	ningkatan kapasitas SDM Pol PP melalui uji kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional pol pp promosi dan kenaikan jenjang jabatan	nlah pejabat fungsional yang mengikuti kompetensi perpindaha n jabatan ke jabatan fungsional pol pp promosi dan kenaikan jenjang jabatan	3	ng	22.500.000	0	ng	0	4	ng	15.280.000		ng			ng			ng			ng		0	ng	-	0	ng	-	00	0,00	tuan Polisi Pamong Praja

		5.02.2.01 .0013	hingkatan kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat	lah SDM sataun pelindungan masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	00	ng	755.169.000	0	ng	0	02	ng	185.126.850		ng			ng			ng			ng		0	ng	-	0	ng	-	00	0,00	tuan Polisi Pamong Praja
		5.02.2.01 .0014	hingkatan kapasitas SDM satuan polisi pamong praja dan satlinmas melalui pelatihan teknis Satpol PP dan SATLINMAS	lah angota satpol pp dan satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui teknis satpol pp dan satlinmas	60	ng	90.000.000	0	ng	0	1	ng	140.000.000		ng			ng			ng			ng		0	ng	-	0	ng	-	00	0,00	tuan Polisi Pamong Praja
		5.02.2.01 .0006	jasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	nlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	545	kumen	3.902.637.500	371	kumen	1.299.000.675	54	kumen	2.341.054.700	2	kumen	48.597.670		kumen			kumen			kumen		2	kumen	48.597.670	373	kumen	1.347.598.345	37	34,53	tuan Polisi Pamong Praja
		5.02.2.01 .0018	ngadaan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	nlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	1	t	76.000.000	0	t	0	1	t	119.829.000		t			t			t			t		0	t	-	0	t	-	00	0,00	tuan Polisi Pamong Praja

		5.02.2.01 .0008	nyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	mlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	11	ku me n	24.500.000	10	ku me n	1.967.000	11	ku me n	7.000.000		ku me n			ku me n			ku me n			ku me n		0	ku me n	-	10	ku me n	1.967.000	91	8,03	tuan Polisi Pamong Praja
		5.02.2.01 .0017	nyediaan Layanandasar dalam rangkaDampak PenegakanPeraturan Daerah danPeraturan kepaladaerah	mlah LaporanPenyediaan LayananDampak Penegakan Perda dan Perkadayang Terlayaniju mlah laporanpemberian pelayanandasar kepada wargalayanan yangterdampak penegakan perda dan perkadayang terlayani	5	bor an	90.000.000	0	bor an	0	25	bor an	5.000.000		bor an			bor an			bor an			bor an		0	bor an	-	0	bor an	-	00	0,00	tuan Polisi PamongPraja
3	ningkatnya penegakkan perda yang tertangani	**5.02.2.02**	**negakan Peraturan Daerah kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**	**mlah Pelanggaran Perda yang tertangani**	**76**	**bo ra n**	**583.000.032**	**63**	**bo ra n**	**1.549.559.957**	**99**	**bo ra n**	**167.258.250**	**12**	**bo ra n**	**12.975.000**		**bo ra n**	**0**	**0**	**bo ra n**	**0**	**0**	**bo ra n**	**0**	**12**	**bo ra n**	**12.975.000**	75	**bo ra n**	1.562.534.957	**68**	**268,02**	**tuan Polisi Pamong Praja**

\

		5.02.2.02 .0010	sialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	nlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	5	por a n	300.000.000	5	por a n	598.560.000	5	por a n	50.000.000		por a n			por a n			por a n			por a n		0	por a n	-	5	por a n	598.560.000	),0 0	199,52	tuan Polisi Pamong Praja
		5.02.2.02 .004	nbinaan dan penyuluhan terhadap pelangar peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	nlah laporan hasil pembinaan dan penyuluhan atas pelanggar peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	5	por a n	48.700.000	0	por a n	0	2	por a n	9.400.000		por a n			por a n			por a n			por a n		0	por a n	-	0	por a n	-	00	0,00	tuan Polisi Pamong Praja
		5.02.2.02 .0012	ngawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah	nlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	46	por a n	160.500.000	33	por a n	40.800.000	46	por a n	50.132.400	8	por a n	9.375.000		por a n			por a n			por a n		8	por a n	9.375.000	41	por a n	50.175.000	13	31,26	tuan Polisi Pamong Praja

		5.02.2.02.0009	mberkasan adminitrasi penyidik oleh PPNS penegak peraturan daerah	lah dokumen pemberkasan hasil penyidikan atas pelanggaran perda	5	ku men	28.500.000	0	ku men	0	2	ku men	3.126.150		ku men			ku men			ku men		0	ku men	-	0	ku men	-	00	0,00	tuan Polisi Pamong Praja
		5.02.2.02.0011	hanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	nlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	25	bor an	122.500.000	25	bor an	910.199.957	22	bor an	20.000.000	4	bor an	3.600.000		bor an			bor an			bor an		4	bor an	3.600.000	29	bor an	913.799.957	6,00	745,96	tuan Polisi Pamong Praja
		5.02.2.02.0007	nyelidikanterhadap dugaanpelanggaranperaturan daerah danperaturan kepaladaerah	lah laporan hasilpeyelidikan atasdugaan pelanggaranperaturan daerah danperaturan kepaladaerah	4	bor an	39.600.000	0	bor an	0	20	bor an	20.000.000		bor an			bor an			bor an		0	bor an	-	0	bor an	-	00	0,00	tuan Polisi PamongPraja
		5.02.2.02.0008	kungan pelaksanaan sidang atas pelanggaran peraturan daerah	lah perkara yang dapat disidangkan	2	bor an	28.000.000	0	bor an	0	2	bor an	14.599.700		bor an			bor an			bor an		0	bor an	-	0	bor an	-	00	0,00	tuan Polisi Pamong Praja

		5.02.2.03	**mbinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/ Kota**	**mlah Laporan Hasil Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)**	**27**	**bo r a n**	**161.440.000**	**2**	**bo r a n**	**820.000**	**11**	**bo r a n**	**194.639.900**	**0**	**bo r a n**	**0**	**0**	**bo r a n**	**0**	**0**	**bo r a n**	**0**	**0**	**bo r a n**	**0**	**0**	**bo r a n**	**0**	2	**bo r a n**	820.000	**41**	**0,51**	**tuan Polisi Pamong Praja**
		5.02.2.03 .0002	mbentukan sekretariat PPNS	at keputusan kepala daerah tentang pembentukan sektretariat PPNS	15	ku m e n	7.200.000	0	ku m e n	0	3	ku m e n	25.000.000		ku m e n			ku m e n			ku m e n		0	ku m e n	-	0	ku m e n	-	00	0,00	tuan Polisi Pamong Praja
		5.02.2.03 .0003	jasama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan penegakan peraturan daerah	lah dokumen hasil pelaksanaan kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan penegakan peraturan daerah	3	ku m e n	25.600.000	2	ku m e n	820.000	3	ku m e n	25.000.000		ku m e n			ku m e n			ku m e n		0	ku m e n	-	2	ku m e n	820.000	67	3,20	tuan Polisi Pamong Praja
		5.02.2.03 .0004	mbentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah	lah Aparatur yang mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah	3	bor a n	70.640.000	0	bor a n	0	1	bor a n	70.640.000		bor a n			bor a n			bor a n		0	bor a n	-	0	bor a n	-	00	0,00	tuan Polisi Pamong Praja

		5.02.2.03 .0005	kungan Operasional sekretariat PPNS	nlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS	2	bor a n	44.000.000	0	bor a n	0	2	bor a n	44.000.000		bor a n			bor a n			bor a n			bor a n		0	bor a n	-	0	bor a n	-	00	0,00	tuan Polisi Pamong Praja
		5.02.2.03 .0006	ngembangan Kapasitas dan Karier PPNS	nlah Laporan Hasil Pengembangan dan peningkatan kapasitas pejabat PPNS Penegak Perda	4	bor a n	14.000.000	0	bor a n	0	2	bor a n	29.999.900		bor a n			bor a n			bor a n			bor a n		0	bor a n	-	0	bor a n	-	00	0,00	tuan Polisi Pamong Praja

Nganjuk, 14 Maret 2025
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN NGANJUK

SUHARONO,S, Sos, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19690905 199003 1 005